

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak tahun 2016 Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA sudah mulai diterapkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu yang menjadi fokus perdagangan adalah industri jasa termasuk sektor pariwisata. Selama beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia mendorong pengembangan pariwisata dengan harapan dapat menggantikan sektor migas yang merupakan sektor utama penghasil devisa negara. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018 jumlah turis asing yang berkunjung meningkat hingga 22% dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 15,81 juta wisatawan.

Pariwisata telah membuktikan potensinya dalam memberdayakan masyarakat lokal dengan membuka lapangan pekerjaan dan mendorong kegiatan yang menghasilkan manfaat di destinasi wisata (Ramchurjee, 2011). Saat ini sektor pariwisata berkontribusi sebanyak 4% dari total perekonomian di Indonesia bahkan diperkirakan sebanyak 9% angkatan kerja nasional dipekerjakan dalam sektor pariwisata. Maka dari itu, dibutuhkan penilaian mengenai pariwisata terhadap pemberdayaan masyarakat lokal (Aghazamani & Hunt, 2017:335).

Konsep pemberdayaan sendiri sudah secara luas di gunakan dalam berbagai topik penelitian diseluruh dunia (Cattaneo & Chapman, 2010; Perkins & Zimmerman, 1995). Rappaport (1987:122) mendefinisikan pemberdayaan sebagai “*the ability of people, organizations, and communities to gain the mastery over one’s affairs*”. Sadan (1997:137) bersuara mengenai pengertian pemberdayaan sebagai proses transisi dari ketidakberdayaan menjadi keadaan dimana seseorang memiliki kontrol terhadap hidup, nasib dan lingkungannya. Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah usaha untuk mengembangkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengendalikan dan menentukan hidupnya.

Secara global pemberdayaan perempuan kini menjadi fokus dalam setiap sektor pembangunan seperti yang diterapkan oleh UNWTO dalam agenda tahun 2030 atau yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* yang bertujuan untuk meningkatkan persamaan gender dan memberdayakan perempuan dalam 15 tahun kedepan. Bahkan kini, isu persamaan gender sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penelitian pariwisata (Kinnard & Hall, 1994:2). Prioritas utama dalam pemberdayaan adalah terciptanya kemandirian, artinya perempuan sebagai bagian dari masyarakat diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam berbagai hal, terutama yang menyangkut kelangsungan hidupnya. Kondisi kekinian perempuan adalah rendahnya pengetahuan, keterampilan, sikap kreatif dan aspirasi, hal ini yang mengakibatkan banyak perempuan hidup dalam kemiskinan dan

termarginalkan (Hasanah, 2013:73) oleh sebab itu perempuan perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Di Indonesia, isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender kini sedang hangat menjadi topik pembicaraan dan penelitian para ahli dari berbagai sektor ilmu pengetahuan. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia meningkat dalam 5 tahun terakhir dan pada tahun 2017 menjadi 71,74. Salah satu kota dengan nilai IDG tertinggi adalah Surabaya dengan nilai indeks pemberdayaan sebesar 82,89 dan menempati peringkat pertama di provinsi Jawa Timur.

Tabel 1 Indeks Pemberdayaan Gender

Kota	Surabaya	Kediri	Madiun	Mojokerto
IGD 2017	82,89	82,36	82,19	82

Sumber: BPS, 2017

Pada tahun 2012 Surabaya mencanangkan diri sebagai Kota Peduli Perempuan, terbukti dengan banyaknya program-program responsif gender yang dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya termasuk program Pahlawan Ekonomi yang ditujukan untuk membina ibu rumah tangga dalam pengembangan UMKM dan pemberian Surabaya *Gender Award* kepada kecamatan yang dinilai responsif terhadap isu persamaan ini. Selain itu Surabaya juga kerap mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya

(APE) sejak tahun 2012 yakni sebuah penghargaan kepada kota/kabupaten yang berkomitmen melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimulai dari penghargaan kategori Utama hingga penghargaan tertinggi kategori Mentor pada tahun 2016.

Salah satu kecamatan yang meraih penghargaan Surabaya *Gender Award* adalah Kecamatan Bubutan yang dimana merupakan lokasi dari kampung kota binaan Pemerintah Kota Surabaya dan Pelindo III, Kampung Wisata Lawas Maspati. Kampung Maspati ini merupakan salah satu kampung lama yang ada di Kota Surabaya dan di dalamnya terdapat beberapa bangunan bersejarah yang masih utuh dan telah dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya (BCB) oleh Dinas Pariwisata Kota Surabaya sejak tahun 2015. Adapun bangunan tersebut berupa bangunan tua bekas markas tentara Belanda, Rumah Ongko Loro, dan makam Raden Karyo Sentono dan Mbah Buyut Suruh yang merupakan kakek dan nenek dari Raden Sawunggaling pada zaman Kerajaan Mataram.

Menurut Choresyo dkk (2017:60) kampung kota merupakan kawasan yang identik dengan permasalahan seperti kemiskinan, kondisi sosial dan lingkungan yang kurang baik, serta suasana masyarakat yang negatif. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif rendah,

norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan dan perilaku masyarakat yang apatis menurut Budiharjo dalam Choresyo dkk (2017:60).

Namun, pariwisata membawa dampak positif di kawasan ini. Kampung Lawas Maspati sukses menjadi percontohan kampung binaan BUMN karena keberhasilannya mengelola pariwisata sekaligus melestarikan budaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sabar Swastono selaku koordinator Kampung Lawas Maspati, sebanyak 80% perempuan yang tinggal di kampung tersebut secara aktif diberdayakan melalui kegiatan pariwisata. Kampung Lawas Maspati berhasil mengubah kawasan yang dulu dikenal dengan bangunan tua menjadi kampung wisata dengan diresmikannya kawasan tersebut menjadi daya tarik wisata pada tahun 2016.

Pemerintah Kota Surabaya dan PT Pelindo III membuat program pengembangan Kampung Lawas Maspati menjadi daya tarik wisata berbasis masyarakat. Pengelolaan wisata berbasis masyarakat ini membuka kesempatan perempuan untuk ikut mengontrol dan terlibat dalam pengembangan pariwisatanya serta mendapatkan manfaat dan pemberdayaan sesuai dengan apa yang dikatakan dengan Hausler (2000).

Scheyvens (2000:236) menyatakan bahwa terdapat 4 dimensi yang perlu dibahas untuk mengetahui apakah perempuan sudah diberdayakan dalam kegiatan pariwisata di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Adapun dimensi tersebut adalah sosial, psikologi, politik dan ekonomi. Meski

pembicaraan mengenai pemberdayaan masyarakat lokal lebih difokuskan pada aspek ekonomi, kenyataannya pariwisata merupakan kegiatan yang multidimensional sehingga membutuhkan penilaian dari aspek lain (Suardana, 2012:8).

Pemberdayaan sosial merupakan suatu situasi dimana rasa kesatuan dan integritas sebuah kelompok menjadi semakin kuat (Scheyvens, 2000:241). Dalam hal ini dapat membuka kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pariwisata, sehingga semakin banyak pula perempuan melalui kelompok bekerjasama untuk mengelola pariwisata (Scheyvens, 2000:241). Namun sayang dalam beberapa konteks sosial, perempuan banyak kehilangan kesempatannya untuk bekerja karena norma sosial masyarakat yang menganggap negatif para pekerja perempuan dalam pariwisata (Suardana, 2012:16) seperti contoh yang terjadi di daerah Himalaya (Lama, 1998) dan Pangandaran, Jawa Barat (Wilkinson & Pratiwi, 1995) dimana profesi pramuwisata biasanya hanya dilakukan oleh pria.

Dalam pemberdayaan psikologi, perempuan optimis tentang masa depannya, memiliki keyakinan pada kemampuannya, dan bangga dengan budaya dan tradisinya (Scheyvens, 2000:239). Terbukti, perempuan Bali yang bekerja dibidang pariwisata merasa lebih mencintai budaya lokal dan memiliki peluang untuk memproduksi hasil karyanya agar dapat memberikan peluang pekerjaan bagi perempuan lain dalam pariwisata (Suardana, 2012:11).

Scheyvens (1999:248) menekankan bahwa pemberdayaan politik harus menyediakan ruang bagi seluruh elemen masyarakat (perempuan, pemuda, kaum disabilitas) untuk menyuarakan pendapatnya, hanya saja terlihat jelas bahwa perempuan kurang terwakili dalam arena politik karena laki-laki lebih tertarik pada politik dan kegiatan pertemuan dibanding perempuan (Dunn, 2007:57).

Dan terakhir pemberdayaan ekonomi, Linberg (1999) berpendapat bahwa pariwisata membantu penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat lokal, meskipun dalam skala yang kecil (Suardana, 2012:11). Dalam konteks keberhasilan membuka lapangan pekerjaan, penelitian yang dilakukan Putra (2018) memperlihatkan perempuan pengusaha Bali berhasil memberdayakan perempuan lain dengan membuka lapangan pekerjaan dan mengubah lanskap relasi gender di Bali. Namun, di beberapa negara berkembang seperti Filipina, justru menunjukkan bahwa pekerja perempuan sering ditempatkan dibawah laki-laki dan menempati posisi yang tidak menguntungkan (*lower position*) (Chant, 1997).

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini dirancang dengan maksud untuk mengetahui pemberdayaan perempuan di Kampung Lawas Maspati, karena perempuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pariwisata (Satyawan. dan Utami:8) dalam aspek sosial, psikologi, politik dan

ekonominya, yang berjudul “**Pemberdayaan Perempuan dalam Kegiatan Wisata di Kampung Lawas Maspati Surabaya**”.

### **B. Fokus Penelitian**

Peneliti ingin mengetahui pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pariwisata di Kampung Lawas Maspati, Surabaya dengan fokus penelitian yakni, bagaimana keadaan pemberdayaan perempuan berdasarkan dari empat dimensi pemberdayaan (Scheyvens, 2000:236) yakni sosial, psikologi, politik dan ekonomi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Kampung Lawang Maspati, Surabaya.

### **D. Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang dialami peneliti, yakni; keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian di lokus penelitian dan keterbatasan mengenai studi/penelitian pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pariwisata.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi bagi pengelola dan masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pariwisata yang dijalankan di Kampung Lawas Maspati, Surabaya.